

SEJARAH PARTAI POLITIK DI PEMATANG SIANTAR (1927-1949)***HISTORY OF POLITICAL PARTIES IN SIANTAR (1927-1949)*****Junita Yosephine Sinurat**

Jurusan FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

junitasinurat@gmail.com**Abstrak**

Sedekah adat atau pembersih kampung dilakukan karena mengingat tingkat mistis yang masih sangat Lahirnya partai politik ditujukan pada terorganisasinya kekuatan rakyat untuk mengendalikan pemerintahan. Pembentukan organisasi sosial politik maupun partai politik di Pematang Siantar berawal dari ide – ide kaum pendatang dari Jawa. Dorongan untuk membentuk partai politik berkaitan dengan masalah kuli kontrak, pengambilalihan tanah – tanah penduduk oleh pihak perkebunan, rendahnya upah kuli perkebunan. Bersamaan dengan meningkatnya kontak dengan Jawa akibat perkembangan pesat jaringan transportasi dan komunikasi serta penyebaran bahasa Indonesia, maka partai – partai politik yang ada di Jawa mulai membuka cabangnya di beberapa daerah, termasuk Pematang Siantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan sejarah partai politik di Pematang Siantar tahun 1927-1945. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui buku – buku ilmiah, majalah, surat kabar, dan bahan – bahan tertulis lainnya mengenai sejarah partai politik. Untuk menganalisis data maka dilakukan beberapa tahapan yaitu menemukan sumber data dan informasi dari narasumber yang relevan dengan sejarah dan perkembangan partai politik di Pematang Siantar.

Kata Kunci: Sejarah, Partai Politik, Organisasi.**Abstract**

The emergence of a political party aimed organized the power of the people to control government. The formation of social organization and political and a political party in Pematang Siantar it started out of an idea of immigrants from Java. Encouragement form a political party pertaining to the matter porters contract, takeover land inhabitants as by the plantation, the low wages porters plantation. Along with an increase in contact with the rapid development Java transportation and communication and the Indonesian, the party political parties in Java start opening up its tributaries in some areas, including Pematang Siantar. This research aimed to see how historical development political parties in Pematang Siantar years 1927-1945. This research using the literature study with descriptive qualitative approach, namely the gathering of data obtained through scientific book, magazine, newspaper, and other written materials about the history of political party. To analyze data then done several phases namely find the the source of data and information from informants relevant to the history and development of a political party in Pematang Siantar.

Keyword: History, Political Parties, Organizations.©Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang
p-ISSN 2550-035X**Pendahuluan**

Pematang siantar merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Utara setelah kota Medan. Sebelum proklamasi kemerdekaan republik Indonesia, Pematang siantar merupakan daerah kerajaan Siantar. Pematang Siantar yang berkedudukan di Pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti keturunan marga Damanik yaitu Tuan Sangnawaluh Damanik, yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906.

Saat zaman kerajaan Marpitu berkuasa, kolonial Belanda sudah semakin menancapkan kekuasaannya di Simalungun, termasuk mempengaruhi Raja – Raja simalungun agar mau tunduk kepada Belanda. Tentu saja, kehendak Belanda ini mendapat perlawanan dari raja – raja Simalungun.

Masing – masing Kerajaan Marpitu itu adalah kerajaan Dolok Silou, kerajaan Silimakuta, Kerajaan Purba, Kerajaan

Siantar, Kerajaan panei dan kerajaan Tanah Jawa. Setiap kerajaan ini melaksanakan tugas pemerintahannya dipimpin seorang Raja, dibantu Dewan Kerajaan yang disebut Harajaan, yaitu semacam kabinet yang terdiri dari pembesar negeri. Kepada mereka diberi gelar bervariasi menurut kebiasaan masing – masing kerajaan.

Kerajaan Siantar waktu itu sudah dipengaruhi kekuasaan Belanda, hingga akhirnya menandatangani Perjanjian Pendek dengan Belanda (Korte Verkalring). Namun dari berbagai sumber sejarah Simalungun diketahui, Sangnawaluh bukan pendiri Kerajaan Siantar tetapi penerus tahta kerajaan, karena Sangnawaluh sudah merupakan pewaris pendahulunya (ketujuh) yang menjadi Raja Siantar pada tahun 1888. Hal ini merujuk dari silsilah Kerajaan Siantar, diketahui rajanya secara berturut – turut adalah Raja Naihorsik – Raja Nai Halang – Raja Namartuah – Raja Mopir – Raja Sangnawaluh – Tuan Torialim (Tuan Marihat) dan Tuan Riahta Damanik (Tuan Didamanik).

Kedua raja Siantar terakhir inilah yang kemudian melakukan Perjanjian Pendek dengan Belanda tanggal 16 Oktober 1907. Sebenarnya dapat disebutkan, bahwa sejak adanya perjanjian pendek antara Raja – Raja Simalungun dengan Belanda, berakhir pulalah kekuasaan Raja – Raja di Simalungun sekitar tahun 1907. Karena sebelumnya Kerajaan Panei, Raya, Silimakuta, Purba, Tanah Jawa, Dolok Silou sudah lebih dulu menandatangani.

Adapun isi perjanjian Pendek itu antara lain: Raja harus mematuhi semua perintah dan peraturan Gubernur General, Raja harus mengakui

kerajaannya menjadi bagian kerajaan Hindia Belanda, Raja tidak boleh mengadakan hubungan dengan pihak asing, Raja tidak memiliki wilayah laut dan pantai, struktur pemerintahan berlaku hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peradaban Belanda serta segala sesuatu harus mendapatkan persetujuan Residen atau wakilnya.

Akibat dari perjanjian tersebut, makin lemahnya kedudukan Raja – Raja simalungun. Hal yang mengakibatkan timbulnya perlawanan terhadap Belanda, dan juga mendorong rasa nasionalisme bagi

pemuda-pemuda di Pematang Siantar. Nasionalisme diwujudkan dengan membentuk organisasi maupun partai politik. Friedrich dalam Budiarto (2000: 161) menyatakan bahwa: “ Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil”.

Perkembangan partai politik di negara–negara Barat seperti Inggris, Perancis, kegiatan Politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok- kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan Raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum.

Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha mengembangkan organisasi massa, dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok- kelompok politik dalam parlemen dengan panitia pemilihan yang memiliki paham dan kepentingan yang sama, dan lahirlah partai politik (Rahman, 2007: 101).

Partai dalam arti modern sebagai suatu organisasi massa yang berusaha untuk memengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota, baru lahir sejak didirikan sarakat Islam pada tahun 1912. Sejak itulah partai dianggap menjadi wahana yang bisa di pakai untuk tujuan – tujuan nasionalis. Selang beberapa bulan, lahir sebuah partai yang didirikan Douwes dekker guna menuntut kebebasan dari Hindia Belanda yaitu Indische Partij. Dua partai tersebut diperkirakan sebagai cikal bakal semua partai politik dalam arti yang sebenarnya di berbagai daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk kajian sejarah adalah metode library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2010: 13-14) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, obyek yang alamiah, penelitiannya merupakan instrument kunci, pengambilan data dan sumber data secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih bersifat makna bukan generalisasi.

Dalam pengumpulan sumber data primer, dilakukan melalui studi kepustakaan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pematang Siantar, Kantor Pemilihan Umum, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara. Dari beberapa tempat tersebut diharapkan diperoleh data tentang partai politik. Sumber sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap mampu memberikan keterangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Munculnya Partai Politik di Pematang Siantar

Berkembangnya kota-kota besar di Sumatera Timur sebagian besar dipengaruhi oleh semakin meluasnya jaringan birokrasi pemerintahan dan perkembangan kepentingan ekonomi perusahaan perkebunan. Controleur Belanda yang sempat berkedudukan di Perdagangan pada tahun 1907 di pindahkan ke Pematang Siantar. Sejak itu kota Pematang Siantar mulai berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru. Apalagi dibukanya jalan - jalan baru ke luar daerah Simalungun, makin membuat banyak orang - orang berlomba- lomba hijrah ke daerah ini. Tahun - tahun berikutnya para pemodal asing membuka lahan - lahan perkebunan di daerah – daerah sekitar Pematang Siantar. Pematang Siantar merupakan penyaluran berbagai hasil perkebunan dan juga pusat

administrasi yang menghubungkan daerah pedalaman dengan daerah perkotaan. Di kota ini tidak hanya terdapat jaringan sarana transportasi dan komunikasi, tetapi juga dipenuhi oleh berbagai kaum pendatang dan ide-ide baru yang datang dari luar daerah Pematang Siantar. Ide-ide itu berasal dari Jawa.

Salah satu ide baru itu adalah pembentukan organisasi sosial politik maupun partai politik. Dorongan untuk membentuk partai politik berkaitan dengan masalah kuli kontrak, pengambilalihan tanah – tanah penduduk oleh pihak perkebunan, rendahnya upah kuli perkebunan. Bersamaan dengan meningkatnya kontak dengan Jawa akibat perkembangan pesat jaringan transportasi dan komunikasi serta penyebaran Bahasa Indonesia, maka partai – partai politik yang ada di Jawa mulai membuka cabangnya di beberapa daerah Sumatera Timur, termasuk Pematang Siantar, antara lain:

a. Masa Penjajahan Belanda

1. Sarekat Islam

Perjuangan menyuarkan pembelaan terhadap penderitaan kuli kontrak di perkebunan kemudian dilakukan juga oleh Sarekat Islam. Cabang Sarekat Islam di Sumatera Timur dibentuk pada tahun 1913 di Medan dengan ketuanya Muhammad Samin, seorang guru dari Sumatera Barat yang kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Tokoh Sarekat Islam di Pematang Siantar adalah H. Nur Said. Pada bulan November 1916, Sarekat Islam cabang Sumatera Timur menerbitkan surat kabarnya “Benih Merdeka” dengan semboyannya “Organ Menontoet Keadilan dan Kemerdekaan”. Koran Sarekat Islam ini menurut M. Said, merupakan surat kabar pertama yang menggunakan kata Merdeka. Di samping itu, oleh karena berada dibawah pengaruh pemimpin – pemimpin politik, tidaklah mengherankan apabila surat kabar itu lebih lantang dibandingkan surat kabar lainnya yang terbit di Sumatera Timur seperti Deli Courant dan Penja Timoer dalam menyuarkan keresahan–keresahan masyarakat.

Melalui surat kabar inilah Sarekat Islam mengangkat persoalan – persoalan

seperti kebencian kepada poenale sanctie, buruknya kondisi kuli – kuli dan rendahnya upah buruh.

2. PKI

Partai Komunis Indonesia (PKI) cabang Sumatera Timur dibentuk tahun 1922. Partai politik ini bersal dari sayap kiri Sarekat Islam atau Sarekat Islam Merah yang telah dikeluarkan oleh ongres Sarekat Islam yang diadakan di Surabaya tahun 1921. Masuknya PKI ke Sumatera Timur membuat wajah pergerakan politik menjadi lebih radikal. Kekuatan partai ini tidak hanya terletak pada kepiawaian dan keterampilan para tokoh-tokohnya tetapi juga terletak pada program-programnya yang langsung mengancam pemerintahan Belanda.

PKI yang didukung Barisan Tani Indonesia ini, segera mengambil alih aktivitas Sarekat Islam di perkebunan – perkebunan. PKI di Pematang Siantar didirikan oleh Abdul Xarim M. S (Mantan wakil ketua PNI cabang Aceh), beliau menyatakan secara tegas bahwa PKI berpendirian radikal dan berupaya menyapu bersih semua kaki tangan musuh. Pernyataan itu ia tujukan kepada para kaum bangsawan yang tetap bekerjasama dengan musuh – musuh Republik. Dalam harian Soeloeh Merdeka, Xarim mengancam “semua penghianat dan kaki tangan musuh akan dipotong lehernya”. Program PKI secara nasional juga menekankan akan perlunya revolusi sosial, termasuk melakukan nasionalisasi dan pembagian tanah.

Jadi perjuangan partai PKI dalam melawan Belanda dan Kerajaan mendapat dukungan, yaitu rakyat Siantar yang telah menjadi anggota partai tersebut. Raja –raja Simalungun memandang PKI sebagai ancaman terbesar terhadap kekuasaan mereka. Di daerah Simalungun termasuk Siantar pada tahun 1927 pengaruh komunis telah meluas di masyarakat, sehingga Raja Siantar terpaksa melakukan kunjungan ke desa – desa dalam wilayah kekuasaannya untuk memburu pendukung komunis dan menjelaskan kepada penduduk desa akan buruknya PKI. Pada bulan Juli 1927, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang melarang setiap pegawai pemerintah untuk memasuki PKI. Pada tahun 1927, PKI

dinyatakan sebagai partai terlarang di Hindia Belanda. Setelah tahun 1945 PKI kembali lagi berorganisasi (Tim Khusus Perencanaan dan Pelaksana Pembangunan Tatengger di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, 1996).

3. PNI

Setelah PKI hancur, muncullah Partai Nasional Indonesia. PNI memberikan satu periode penting dalam sejarah pergerakan politik di Sumatera Timur khususnya Siantar. Dikatakan demikian karena dengan adanya PNI, muncul ideologi nasionalis sekuler yang berdasarkan kepada persatuan Indonesia, menolak bekerjasama dengan pemerintahan kolonial dan berdiri diatas kekuatan sendiri. Munculnya PNI di Siantar tidak dapat dilepaskan dengan aktivitas Mr. Iwa Kusuma Sumantri.

Pada tahun 1930 mengikuti organisasi induknya di Jawa, PNI di Siantar dibubarkan menyusul ditangkap dan dipenjarakannya Soekarno dan beberapa dewan pimpinan partai itu. Namun setelah tokoh – tokoh PNI dipenjara, pada tahun 1931 tokoh – tokoh lainnya seperti Hatta dan Syahrir membentuk Partindo (Partai Indonesia). Banyak bekas – bekas pendukung PNI yang bergabung dengan Partindo. Mereka dengan cepat mendirikan cabang – cabang Partindo di kota – kota seperti Siantar. Akan tetapi akibat tindakan pemerintah Belanda yang sangat represif, maka Partindo dengan cepat hancur dan membubarkan diri pada tahun 1936. Adam Malik pernah menjadi ketua Partindo tahun 1934 – 1935 di Siantar dan Medan.

4. Parindra dan Gerindo

Cabang Parindra Sumatera Timur dibentuk di Medan pada tahun 1935. Dua tahun kemudian dibentuk di Siantar. Pusat aktivitas partai di kota Medan, dan tokoh – tokohnya ialah Sutan Noer Alamsyah, S. M Tarigan, Mr. Loeat Siregar, Sugondo Kartoprodjo, Dr. Pirngadi.

Cabang Gerindo di Siantar berdiri tahun 1938. Pada masa itu Gerindo secara terang – terangan menyatakan sikap sebagai antikolonial, anti Eropa, anti kapitalisme, menuntut kemerdekaan nasional dan menuntut hak – hak tanah rakyat. Jumlah anggota Gerindo di Siantar sebanyak 37

orang. Meski jumlah anggotanya sangat sedikit, tetapi Gerindo mampu membangkitkan semangat nasionalisme. Sama seperti partai lainnya, Parindra dan Gerindo juga mendapat tekanan keras dari pemerintah Belanda. Dengan adanya perang dunia kedua, situasi politik tidak menguntungkan Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh organisasi–organisasi politik di Indonesia untuk memperkuat diri. Gerindo dan Parindra di Sumatera Timur membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada bulan Oktober 1939. GAPI sering mengadakan rapat – rapat umum di Medan, Binjai, Tebing Tinggi dan Siantar untuk menuntut pada pemerintah Belanda agar membentuk dewan rakyat di Sumatera Timur dan sekaligus membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat.

5. Partai Politik Berbasis Agama Kristen

Partai Politik Masehi merupakan partai dengan azas kekristenan. Partai Politik Masehi Pematang Siantar adalah penjelmaan dari Perserikatan Christen Indonesia (PERCHI) yang berdiri sebelum Perang Dunia II di Pematang Siantar. Partai ini juga bergabung dalam Partai Kristen Nasional yang kemudian diganti namanya menjadi Partai Kristen Indonesia (PARKINDO). Partai ini cukup dikenal terutama bagi penduduk siantar yang beragama Kristen.

Anggota PARKINDO saat itu adalah penduduk yang beragama Kristen, dimana PARKINDO juga berbasis agama Kristen, jadi sangat mudah merekrut anggota partai karena kesamaan agama. Selain PARKINDO ada juga salah satu yang disebut partai berazaskan kekristenan yaitu HCB (saat ini dikenal juga dengan HKI), diperkirakan ini merupakan bentukan dari HKB. HCB bukanlah bentukan dari Tuan Manullang yang merupakan pendiri organisasi politik HKB. Perjuangan politik Tuan Manullang menginspirasi dalam pendirian kemandirian gereja HCB.

Hubungan HKB dengan HCB hanya bersifat moral berupa pengaruh perjuangan HKB terhadap pembentukan opini orang Batak Toba khususnya untuk kemandirian dan kemerdekaan, juga kesamaan pandangan terhadap kekuasaan orang asing. Walaupun

ketua HKB, M.H Manullang kemudian menjadi anggota HCB bahkan diangkat menjadi pendeta menjelang masa kemerdekaan Indonesia (Simanjuntak, 2009: 322). HCB disebut dengan partai 123, tetapi HCB menolak disebut dengan partai politik. Keinginan masuk menjadi anggota partai politik masih hampir sama seperti saat sekarang, dimana seseorang memilih suatu partai politik karena agama ataupun etnisitas. Walaupun setiap partai mempunyai tujuan dan program untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan dari orang asing, tetapi partai yang berbau agama dan etnisitas mempunyai ketertarikan tersendiri bagi penduduk.

b. Masa Pendudukan Jepang

Penduduk Siantar menyaksikan kedatangan Jepang dengan kagum dan heran karena kecerdasan akal Jepang dalam menyiasati terputusnya jalan dari Sinaksak ke Siantar. Langkah selanjutnya yang dilakukan Jepang di awal kedatangannya ialah dengan membuka penjara Siantar dan membebaskan seluruh orang – orang yang ditahan dan atau dihukum di tempat itu. Sejak kejadian itu rentetan peristiwa anarkis terjadi seperti penjarahan toko – toko dan gudang – gudang milik Belanda. Tentara jepang tidak peduli dengan hal tersebut yang berlangsung selama lebih dari 5 hari. Kondisi sosial ini memberikan tekanan traumatis bagi penduduk.

Setelah menjejakkkan kakinya di bumi Indonesia, Jepang menggantikan fungsi dan kedudukan Belanda, malahan lebih kejam lagi. Kekejaman Jepang sebagai penjajah terus berlanjut, kota Siantar berubah menjadi seperti kota mati. Gerakan – gerakan massa secara terbuka yang dilakukan selama masa pemerintahan Bala tentara Jepang dapat dikatakan tidak ada. Para pemuda pejuang lebih memilih gerakan bawah tanah dan penyiapan pasukan milisi sipil (Pranoto, 2001: 21-22).

Pada masa pendudukan Jepang partai politik dan segala aktivitas politik dilarang, walaupun begitu partai Gerindo, PNI masih beraktivitas secara sembunyi – sembunyi. Organisasi militer bentukan Jepang dimanfaatkan oleh kaumpolitisi Indonesia, termasuk Pematang Siantar untuk tujuan Indonesia merdeka.

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan, kader – kader Indonesia Muda, kader Gerindo, dan kader PNI bertemu untuk membicarakan persiapan di toko Singapore pada akhir Juli 1945. Tokoh – tokoh yang ikut rapat tersebut yaitu Abdullah Sani (pegawai grivir Landraad Simalungun), Abdullah Yusuf dari kampung Tomuan, Hasan Samosir dari kampung Kristen, Pertamina Nainggolan dari kampung Melayu, Basyruddin, Guru Umbar dari Bahkapul, A. Firman Lubis dari Kampung Banten, dan Anwar Malik ‘Faroka’ Lubis dari Timbang Galung. Selain itu ada juga Mahmud Halim, A. Manan Eyanur, A. E Saragih Ras dari Tigaras, A. Julan Purba dari Pematang Raya dan Jantogam Damanik dari Panei Tongah. Dari pembicaraan itu dihasilkan bahwa, “Kader – kader Indonesia Muda, kader Gerindo dan kader PNI harus berani mengambil resiko, mempersiapkan diri, membantu semacam pasukan bersenjata untuk kemerdekaan.

c. Masa Proklamasi

Pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia, berita tersebut disambut gembira seluruh masyarakat. Berita Proklamasi di kumandangkan di Medan dan sampai ke Pematang Siantar pada akhir September dan awal Oktober 1945. Pada akhir September 1945, setelah proklamasi bergaung di Pematang Siantar, kader – kader Indonesia Muda/ Gerindo mengadakan pertemuan lanjutan bertempat di Toko Singapore.

Di dalam toko/ kedai telah hadir Abdullah Yusuf dari Tomuan, Hasan Samosir dari kampung Kristen, Basyruddin dari kampung Melayu, Guru Umbar dari Bahkapul, Abdullah Sani dan A. Firman Lubis dari kampung Banten, Anwar Malik dari Timbang Galung, dan A. E Saragih Ras. Pertemuan tersebut membahas upaya membangun fokus pergerakan dan organisasi perjuangan kader – kader PNI Pematang Siantar/Simalungun dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian disepakati untuk menindaklanjuti pengorganisasian baru yang dilakukan aktivis PNI di Sumatera Utara, yakni membangun milisi perjuangan (lasykar rakyat). Milisi yang berbasis perkotaan dan

pedesaan disebut dengan nama Nasionalais Pelopor Indonesia (Napindo), milisi yang beroperasi di pegunungan disebut Barisan Harimau Liar (BHL), sedang yang bergerak di kawasan pantai adalah satuan Nelayan Merdeka (BELA).

Unit – unit kesatuan Napindo di daerah disebut dengan resimen, untuk kawasan Siantar/ Simalungun disebut dengan Resimen Benteng yang berkedudukan di Bahkapul. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) pada tanggal 2 Oktober 1945. Pada tanggal 29 Desember 1945 Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Mr. T. M. Hassan sebagai Gubernur Sumatera, sedangkan sebagai Residen Sumatera Timur dipilih M. Jusuf.

Pada tanggal 3 November 1945 Pemerintah Pusat mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai – partai. Dengan demikian bermunculanlah partai – partai baru seperti: Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI) dan kekuatan sosial lainnya yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Partai – partai berjuang secara politis dan fisik dengan barisan bersenjata (laskar), misalnya PNI dengan laskarnya disebut NAPINDO (Nasional Pelopor Indonesia), Partai PSI dengan laskarnya PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia), Masyumi dengan laskarnya Barisan Merah. Pertumbuhan partai – partai beserta laskarnya itu mempunyai pengaruh yang sangat besar pula di setiap daerah.

PKI merupakan partai yang sudah ada sebelum proklamasi kemerdekaan di Pematang Siantar, partai ini kembali aktif sejak tahun 1945 (Soeloeh Merdeka, 8-9 April 1946). Pada tahun 1946, di Sumatera Timur suhu politik semakin memanas karena adanya pertentangan berbagai golongan. Misalnya antara modal asing dengan buruh (kuli), Raja – raja dengan rakyat. Demikian pula adanya saling berebutan kekuasaan diantara partai – partai. Kemudian timbul pula pernyataan – pernyataan untuk menghapuskan Swapraja (Sultan, Raja): “kikis habis feodalisme sampai keakar – akarnya”.

Oleh karena pernyataan – pernyataan dan desakan berbagai golongan dan aliran partai, maka KNI Sumatera Timur

bulan Januari 1946 mengajak para Swapraja membicarakan masalah tersebut, yaitu keinginan rakyat untuk merubah system pemerintahan kedalam demokrasi sesuai dengan isi Proklamasi. Pihak Swapraja menjanjikan akan memikirkan dan melaksanakan apa yang di tuntutan dari mereka.

Selama bulan Januari 1946, ketegangan antara partai – partai dengan pihak Swapraja semakin meningkat. Pihak swapraja menunjukkan sikap pendirian yang tidak tetap dan sangat lambat dalam prakteknya untuk memenuhi janji mereka kepada pemerintah pada saat pertemuan bulan Januari tersebut tidak lain adalah demi kepentingan mereka sendiri (Biro Sejarah Prima, 1976: 292).

Pada tanggal 3 february 1946 diadakanlah penemuan kembali antara pihak Swapraja dengan pihak Pemerintah Sumatera Timur. Pertemuan itu dipimpin oleh ketua KNI Mr. Luat Siregar. Dalam pertemuan itu dibicarakan kembali keadaan dan situasi pemerintahan Republik Indonesia dengan memperingatkan posisi serta janji swapraja yang sudah diucapkan pada pertemuan Januari 1946.

Ternyata pihak swapraja belum menyatakan kesediaan untuk melepaskan haknya sebagai swapraja, mereka berjanji akan menyanggupi pelaksanaan kedaulatan. Setelah pertemuan bulan February 1946 berlangsung pula rapat khusus antara para pemimpin partai PNI, PESINDO dan PKI dengan beberapa Residen yang sepaham pembicaraan mengenai penguasa swapraja yang tidak mendukung proklamasi dan perjuangan, bahkan cenderung menerima kedatangan Belanda kembali dengan membentuk Commite Van Ontvangest (CVO) hanya karena benda dan kedudukan (Anthoni Reid, 1978: 82).

Selama bulan Januari dan February 1946, aktifitas para pemimpin politik PKI, Masyumi, Pesindo, Parki, dan Lasykar Rakyat telah berhasil mengarahkan perhatian publik (masyarakat) terhadap hak–hak istimewa kerajaan, Cina, Eropa, pegawai sipil colonial, dan pengusaha onderneming. Dalam kondisi kekacauan ekonomi dan semangat nasionalisme yang meluap – luap itu, para pemuda, buruh kebun, lasykar rakyat dan kaum politisi

nasionalis, memandang bahwa tuntutan material akan terpenuhi dengan menghancurkan hak–hak istimewa kerajaan. Penghancuran kerajaan menjanjikan memperoleh tanah, uang, perhiasaan dan bahan–bahan lainnya.

Kesimpulan

Dalam kurun waktu 1927 – 1949, berbagai partai politik yang muncul, antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan organisasi sosial politik maupun partai politik di pematang Siantar berasal dari ide – ide dari Jawa atau para pendatang. Dorongan untuk membentuk partai politik berkaitan dengan masalah kuli kontrak, pengambilalihan tanah – tanah penduduk oleh pihak perkebunan, rendahnya upah kuli perkebunan.
2. Perkembangan partai politik di Pematang Siantar sebelum kemerdekaan dibagi menjadi masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda dapat dilihat dari cukup banyaknya partai yang ada seperti; Sarekat Islam, PKI, PNI, PARTINDO, PARINDRA, GERINDO, GAPI dan PARKINDO. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi atau partai politik dilarang, walaupun begitu Gerindo dan PNI masih bergerak secara sembunyi – sembunyi.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS. *Pematang Siantar dalam Angka* (Pematang Siantar : BPS, 2008).
- Budiarjo, Miriam. 2000. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Pranoto, Drs. H Tukidjan. 2001. *Tetes Embun di Bumi Simalungun*.
- Rahman H. I, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reid, Anthony. 1978. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.
- Simanjuntak, BAS. 2009. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Tim Khusus Perencanaan Dan Pelaksana Pembangunan Tatengger Di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. 1995. *Perjuangan Menegakkan dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sumatera Utara (1945 – 1949)*.